

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DALAM MENERTIBKAN PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Pantun Andrianus Lumban Gaol

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat: Jl. Putri Indah Perum. Sudirman Indah No. 9

Email : pantunandrianus@yahoo.com – Telepon: 082247041599

ABSTRACT

Traditional medicine is one of the treatment and care efforts in other ways outside of medicine and nursing. Traditional medicine is usually used drugs that made of traditional of materials - scholarly materials such as spices - spices or commonly known in Indonesia with the term "herbal" as traditional healing. medicine it self has wide - types, benefits and functionality to cure various disease. Traditional medicine is in demand by the community, especially the low income people, because traditional medicine itself than low cost, too easily obtained and its availability is not limited when compared to prescription drugs are relatively limited.

Traditional medicine is generally used traditional medicine needs to be fostered and monitored by the government to be able to be directed to the treatment and care that can be justified efficacy and safety. The government in this case the Ministry of Health is responsible for the control and supervision of traditional medicine as stated in the Act - Act No. 36 of 2009 on Health and established official institutions non-departmental government (Officials) which is responsible to the President and coordinated by the Ministry of Health and Social Welfare called the Food and drug Administration, which carry out government duties in the field of food and drug supervision in accordance with applicable regulations.

Every traditional medicine in circulation to go through the assessment process, testing and registration in advance. Assessment and testing of traditional medicine is intended to prove the efficacy, safe and reliable, helpful traditional medicine. Therefore unregistered prohibited imported, distributed, stored and consumed, so that traditional medicine is categorized as a dangerous and contrary to regulations. But the fact that many traditional medicine illegal unregistered and considered a dangerous drug, there is a kind of traditional drugs containing chemicals, drugs (BKO) and traditional medicines that do not have a marketing authorization which are sold freely on the market and in pharmacies - pharmacy-by in order to obtain profit for the people, thus leading to losses that can be fatal to those who consume them.

Keywords: Role of Investigators - Marketing Authorization - Great Hall of Drug And Food

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan di bidang kesehatan yang merata, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat kuat dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.¹ Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan

pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional.²

Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran maupun ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan obat tradisional yang terbuat dari bahan – bahan ilmiah seperti rempah – rempah atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah “jamu” sebagai penyembuhan. Obat tradisional sendiri mempunyai bermacam – macam jenis, manfaat maupun fungsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Sehingga obat tradisional itu diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi rendah, karena obat tradisional itu sendiri selain harganya murah, juga mudah dapat didapatkan dan ketersediaannya tidak terbatas bila dibandingkan obat resep dokter yang relative terbatas.³ Sehingga obat tradisional sendiri perlu pedoman tentang tata cara pembuatan yang baik sehingga apa yang diproduksi dapat terjamin mutunya. Pengobatan tradisional yang pada umumnya menggunakan obat tradisional perlu dibina dan diawasi oleh pemerintah untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan maupun perawatan yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya. Selain itu

¹

www.yayasanhak.minihub.org/direito/txt/2003/22/10/-direito.html

² Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, PT.Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta: 2008, hlm. 5

³ Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada : 2006, hlm.152-153

perlu ditingkatkan pula pengendalian dan pengawasan lalu lintas penggunaan obat tradisional baik dalam proses produksi, peredaran maupun pengkonsumsiannya. Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan obat tradisional sebagaimana yang tertera dalam Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mendirikan lembaga resmi pemerintah non departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang dinamakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang Pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

Untuk menyelesaikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang tidak memiliki standar kesehatan tersebut, maka diperlukan peranan aparat hukum. Aparat hukum yang berwenang disini menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah :⁵

1. Pejabat Polisi Negara RI;
2. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang–undang.

Penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang dalam memberantas tindak pidana dibidang kesehatan, salah satunya peredaran obat

tradisional ilegal adalah penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan.

Fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan adalah:⁶

1. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Pemerintah memberikan kewenangan khusus kepada PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Pengaturan ini terdapat dalam :

1. Undang–Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
2. Undang–Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 7 ayat (2) serta Undang–Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

⁴ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁵ Undang–Undang No.81 Tahun 1981, tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, LN RI No.76 Tahun 1981, TLN RI No.3209, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

⁶ Ibid, Pasal 342.

melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

Dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang isinya mengatakan penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri⁷. Kewenangan yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian, namun di dalam prakteknya peran dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan kurang optimal didalam menanggulangi dan penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan obat dan makanan khususnya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya:⁸

- a. Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana.
- b. Kurangnya koordinasi dengan penyidik Polri dan aparat

penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing– masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan.

- c. Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan mengkaji mengenai peranan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam menertibkan peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin , dalam suatu penulisan proposal skripsi yang berjudul ***“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menertibkan Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam menertibkan peredaran obat tradisional tanpa izin berdasarkan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan di Pekanbaru?
2. Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menertibkan peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin?

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat 2

⁸ Wawancara dengan *Bapak Alex Sander S.Farm*, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM Pekanbaru, Hari Senin 26 Oktober, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

3. Apa sajakah upaya penyelesaian tindak pidana terhadap penggunaan obat tradisional yang tidak memiliki standar kesehatan yang diperjual belikan secara bebas di tengah masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menertibkan penggunaan obat tradisional yang tidak memiliki izin yang masih diperjual belikan di tengah masyarakat berdasarkan UU No 36 tahun 2009;
- b. Untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi dalam upaya penggunaan obat tradisional yang tidak memiliki izin yang diperjual belikan secara bebas di tengah masyarakat;
- c. Untuk mengetahui cara penyelesaian dalam menertibkan peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin di wilayah Kota Pekanbaru;

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui upaya penertiban terhadap penggunaan obat tradisional yang tidak memiliki standar kesehatan yang diperjual belikan secara bebas di tengah masyarakat berdasarkan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan di Pekanbaru;
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis tentang kesulitan yang dihadapi dalam upaya

penertiban terhadap penggunaan obat tradisional yang tidak memiliki standar kesehatan yang diperjual belikan secara bebas di tengah masyarakat;

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang sering disebut *delict*.⁹ Pembuat Undang-Undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹⁰ Pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan hukum yang berlaku disuatu Negara.¹¹

Stafbaar feit menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹² Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam arti bahwa,

⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm.52.

¹⁰ Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Amirco, Bandung: 1985, hlm.77.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2008, hlm.9.

¹² Simons dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002, hlm.69

seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dianggap dapat merugikan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan atau menghambatterlaksananya dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil sehingga dapat pula dikatakan bahwa tindakan tersebut bersifat merugikan dan menjadi anti sosial.

2. Teori Peranan

Secara sosiologis, penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang – sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹³ Penegakan Hukum menurut Martokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsure-unsur

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁴

Pelaksanaan hukum adalah kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak maka peraturan itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.¹⁵

4. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

¹³ Hardjasoemantri dalam R.M Gatot P. Soemanrtono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996, hlm.68.

¹⁴ Mertokusumo dalam *Ibid*, hlm.65.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta: 2006, hlm.225.

tentang Perlindungan konsumen merupakan konsumen akhir.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan di kaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian dilakukan pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, jalan Diponegoro No.10 Pekanbaru. Karena di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, saya bisa mendapatkan data-data lengkap tentang kasus tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencakup diseluruh wilayah Pekanbaru.

3. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan

penelitian ini.¹⁸ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- b) Penyidik Pegawai Negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- c) Pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- d) Konsumen obat tradisional tanpa izin.

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta perturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁶ Elsi Kartika Sari dan Edvendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Grasindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 120.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang No 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - e) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - f) Peraturan pemerintah No 72 Tahun 1998, tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Yaitu bahan-bahan peneliti yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.
- 3) Bahan hukum tersier
- Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.
- 5) Teknik Pengumpulan Data**
- a) Wawancara yaitu Tanya jawab secara langsung dengan responden. Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.
 - b) Studi Kepustakaan
- Kajian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak

pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh PPNS BBPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Kota Pekanbaru. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian Hukum Sosiologis untuk mencari data sekunder dan mendukung data primer.

6) Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka penggunaan metode analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri dengan kalimat-kalimat. Dalam metode kesimpulan dapat digunakan metode *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Pekanbaru

Berdasarkan tujuan dari kodifikasi dan unifikasi, maka secara tata cara dari suatu proses pidana yang akan diperiksakan, diadili dilingkungan peradilan umum harus berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum secara pidana. Walaupun pada dasarnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara pidana mempunyai kedudukan yang sejajar, tetapi antara kedua undang-undang tersebut mempunyai fungsi yang berbeda karena, undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah merupakan ketentuan hukum materil yang berfungsi mengatur dan menetapkan kewajiban, larangan atau sanksi pidananya, sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah ketentuan hukum formil yang berfungsi mengatur cara-cara menetapkan sanksi pidana secara benar jika terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.

Dari data Balai Besar Pengobatan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru melaporkan bahwa peredaran makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan khususnya obat tradisional selama periode tahun 2014 sampai dengan 2015 telah mencapai 17 kasus pidana obat dan makanan dan 29 kasus tindak pidana obat tradisional yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹⁹ Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, penyidikan dibidang kesehatan adalah suatu proses yang ditangani oleh pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dibidang Kesehatan ,terhadap setiap orang yang melakukn perbuatan dalam tindak kesehatan. Dalam hal melakukan penyidikan, penyidik kesehatan sepenuhnya berpedoman

kepada hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,tentang KUHP.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Di Pekanbaru

Usaha pemberantasan diartikan sebagai usaha meminimalisir dan mengurangi kejahatan tindak pidana kesehatan diwilayah Kota Pekanbaru, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, maka penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan upaya *refresif and preventif* terhadap tindak pidana tersebut.

Namun dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut untuk memberantas Tindak Pidana Kesehatan khususnya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, ada 5 faktor dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas peredaran obat

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Alex Sander S.Farm, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM Pekanbaru, Hari Senin 15 Februari 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

tradisional ilegal di Pekanbaru, yaitu :²⁰

1. Faktor hukum itu sendiri atau Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru yang berkaitan dengan faktor hukum adalah tidak adanya peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana Peredaran obat tradisional ilegal. Sebagaimana kita ketahui, bahwa tindak pidana dibidang kesehatan khususnya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal merupakan tindak pidana khusus. Oleh karenanya diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana Obat tradisional baik secara formil maupun materilnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah sebagai berikut :

a. Internal

Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam atau *internal* penyidik

pegawai negeri itu sendiri, dimana faktor *internal* ini berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dinas kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.

b) Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan yang berasal dari luar.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana terdiri dari :

- a) Minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian ketempat penampungan.
- b) Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat

²⁰ *Ibid.*

mempengaruhi penegegakan hukum tersebut.

Faktor masyarakat terdiri dari :

a) Kurangnya peran serta pelaku usaha atau Pedagang

Peran serta pedagang dalam memutuskan mata rantai tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal tersebut sangat minim, adanya kerjasama pedagang dengan pelaku tindak pidana dengan menjual produk yang diedarkan pelaku dan ada beberapa pedagang menutupi identitas pelaku tindak pidana.

b) Kurangnya peran serta dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat

Masyarakat masih kurang kooperatif dalam mengungkap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal ini, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal ini ke pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dan Kepolisian sehingga pihak penyidik harus berperan aktif sendiri untuk mengungkap kejahatan ini, begitu juga terhadap barang yang beredar dipasaran, masyarakat sama sekali tidak melaporkan adanya barang-barang ilegal yang dijual dipasaran dan justru sebaliknya masyarakat yang menjadi konsumtif

dari barang-barang tersebut hanya tinggal diam.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Pekanbaru

1. Upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru

Adapun upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal adalah dengan mengajukan usulan kepada pemerintah melalui pimpinan yakni kementerian kesehatan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.²¹ Usulan tentang pembuatan aturan khusus itu akan memberikan kejelasan tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal dan pejabat-pejabat yang berwenang dalam melakukan penanganan atau penyidikan terhadap tindak

²¹ Wawancara dengan Bapak Alex Sander S.Farm, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM Pekanbaru, Hari Senin 22 Februari 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

pidana peredaran obat tradisional ilegal.

2. Upaya yang dilakukan PPNS BBPOM terhadap faktor penegak hukum

a) Upaya untuk mengatasi hambatan *Internal*

1) Upaya yang dilakukan PPNS BBPOM terhadap hambatan kurangnya jumlah personil dan kualitas SDM

Menurut Kepala Seksi Penyidikan, salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidik Polri dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia dari penyidik adalah dengan cara antara lain²².

- a. Memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan
- b. Menambah jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi

dalam penanganan kasus pidana.

b) Upaya untuk mengatasi hambatan *Eksternal*

1) Meningkatkan kerjasama PPNS BBPOM dengan Instansi terkait

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru terus berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dibidang Kesehatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dalam tugasnya memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar bisa tercipta penegakan hukum seperti yang diharapkan. Untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya perilaku menyimpang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka pihak penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan koordinasi, baik itu didalam satuan organisasi penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar

²² Wawancara dengan *Bapak Alex Sander S.Farm*, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM Pekanbaru, Hari Senin 22 Februari 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

Pengawasan Obat dan Makanan maupun dengan instansi-instansi lain yang terkait, misalnya kerjasama dengan Bea Cukai dan Polri sebagai Korwas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.²³

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Faktor Sarana dan fasilitas

a) Upaya terhadap hambatan minimnya anggaran yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan PPNS dalam proses penyidikan

Adalah menambah anggaran dana untuk kepentingan penyidikan dan kegiatan operasional. Untuk menjalankan tugasnya dibidang pengawasan, kegiatan operasional dan penyidikan mulai dari upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti, banyak membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini diakui oleh Kepala Seksi dibidang Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, sedangkan anggaran yang dianggarkan pemerintah tidak memadai untuk kepentingan penyidikan dan kegiatan operasional penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan

Makanan. Maka dari itu untuk menjalankan tugasnya dengan optimal, diperlukan dana anggaran yang cukup untuk melakukan tugas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan dari Pemerintah.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor masyarakat

a) Memberi pendekatan kepada Pedagang dan Masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Balai Besar Pengawasan Obat dan

²³ *Ibid.*

²⁴ Zainudin Ali, *Op.cit.* hlm. 66.

Makanan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru adalah dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana obat tradisional ilegal misalnya : Melakukan pemeriksaan atas laporan, pengumpulan barang bukti, penangkapan dan penahanan pelaku sementara yang dibantu oleh pihak Kepolisian, melakukan pemeriksaan atas laporan, Pengumpulan barang bukti, Penangkapan dan Penahanan pelaku sementara yang dibantu oleh pihak kepolisian, melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka oleh PPNS BBPOM, Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kepada Penyidik Polri, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pori berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal khususnya dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.
2. Hambatan yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan

Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut, tidak adanya peraturan khusus tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal baik tentang hukum materil maupun formilnya. Dari faktor penegak hukumnya, seperti sumber daya manusia yang ada masih belum berkualitas, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ada, kurang koordinasinya penyidik pegawai negeri sipil balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan penegak hukum lainnya. Faktor sarana dan prasarana dan finansial yang kurang memadai, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, khususnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota pekanbaru untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di pekanbaru dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan fasilitas serta jumlah penyidik

- pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pihak penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Kepolisian, Bea Cukai atau instansi yang terkait dalam tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, pemerintah, dan para pedagang serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kepastian untuk memberantas peredaran obat tradisional ilegal tersebut.
 3. Penyuluhan hukum harus selalu dan sering diberikan kepada masyarakat dan kepada para pedagang secara rutin agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat tahu mengenai bahaya obat tradisional ilegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmito, Wiku, 2006, *Sistem Kesehatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batsan Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hardjosaputra, Purwanto. 2008, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, PT. Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta.

- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Amirco, Bandung.
- Sari, Elsi Kartika dan Edvendi Simangunsong, 2005, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Grasindo Persada, Jakarta
- Soemartono, R.M Gatot P, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.